

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Persoalan ketenagakerjaan bukan hanya permasalahan sektoral, yaitu Kementerian Tenaga Kerja atau BNP2TKI saja, melainkan permasalahan multi sektoral yang komprehensif. Permasalahan ketenagakerjaan itu adalah masalah pertumbuhan ekonomi, investasi, iklim usaha dan lain sebagainya, yang ujungnya adalah persoalan ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai hari ini tidak lebih dari 5%, jika dihitung setiap 1% pertumbuhan ekonomi, menghasilkan 250.000 lapangan kerja, artinya jika pertumbuhan ekonomi 5% saja, baru ada 1.250.000 lapangan kerja. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru di Indonesia rata-rata 2,7 Juta, artinya setiap tahun ada 1,5 juta pengangguran baru.

Permasalahan pengangguran ini, bisa diselesaikan diantaranya dengan migrasi tenaga kerja, yaitu mencari peluang kerja di luar negeri. Namun disisi lain, persoalan masih tetap ada, rata-rata pengangguran yaitu 62% dari pengangguran itu memiliki standar pendidikan SD/SMP. Ini berarti tenaga kerja *unskill* (tidak mempunyai kemampuan), sehingga sering kali ketika di luar negeri menjadi masalah.

Di Indonesia dikenal adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah atau gaji. Tingginya angka pengangguran tak seimbang dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Tidak sedikit pula tenaga kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan di dalam negeri tetapi nilai upah atau gaji yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diharapkan. Semakin tingginya kebutuhan ekonomi mendorong para tenaga kerja untuk mencari pekerjaan yang lebih layak untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Keinginan setiap orang untuk merubah nasib menjadi lebih baik mendorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri dikarenakan upah yang diterima lebih besar dan adanya peluang untuk dapat bekerja disana. Selain itu dengan penghasilannya yang lebih besar, maka setiap orang berharap dapat memenuhi

berbagai kebutuhan hidupnya. Iming-iming penghasilan yang lebih besar itulah yang kemudian memicu orang berbondong-bondong pergi bekerja ke luar negeri, demi berkecukupan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang dapat begitu saja pergi ke luar negeri dan langsung mendapatkan pekerjaan. Melainkan harus memenuhi persyaratan untuk dapat bekerja di luar negeri.

Tenaga kerja Indonesia yang layak untuk dipekerjakan di luar negeri harus memiliki kriteria khusus, yaitu: usia, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja. Kriteria-kriteria tersebut menjadi acuan dalam proses penyeleksian kelayakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Kebijakan dan program pemerintah dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan pasar kerja Internasional penempatan TKI dilakukan melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal.

Semua TKI yang bekerja di luar negeri adalah bagian dari unsur negara yang walaupun untuk sementara mereka hidup di luar negeri, akan tetapi tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Salah satu hak yang paling dibutuhkan yaitu selama pra keberangkatan, selama bekerja hingga tiba kembali di tanah air adalah hak mereka untuk mendapatkan perlindungan, baik perlindungan secara hukum ataupun perlindungan secara sosial.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat penempatan TKI ke berbagai negara di dunia per Desember 2015 sebanyak 275.736 orang. Jumlah tersebut meliputi 55% TKI formal dan 45% sisanya bekerja di sektor informal. Data penempatan TKI formal dan informal sepanjang tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan kecenderungan yang berubah-ubah. Pada tahun 2015 jumlah TKI yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 275.736 TKI, menurun drastis dibandingkan 2014 yang mencapai 429.872 TKI. Sementara pada tahun 2013, penempatan TKI ke luar negeri sebanyak 512.168, pada 2012 berjumlah 494.609 TKI, dan tahun 2011 sebanyak 586.802 TKI.

Dari sisi gender, jumlah penempatan TKI perempuan selama lima tahun terakhir (2011 – 2015) masih tergolong tinggi dibanding TKI laki-laki. Penempatan TKI tahun 2011 sebanyak 586.802 orang, terdiri dari 376.686 TKI

perempuan (64%) dan 210.116 TKI laki-laki (36%). Tahun 2012 sebanyak 494.609 TKI, terdiri dari 279.784 TKI perempuan (57%) dan 214.825 TKI laki-laki (43%). Tahun 2013 sebanyak 512.168 TKI, terdiri dari 276.998 TKI perempuan (54%) dan 235.170 TKI laki-laki (46%). Tahun 2014 sebanyak 429.872 TKI, terdiri dari 243.629 TKI perempuan (57%) dan 186.243 TKI laki-laki (43%). Kemudian pada tahun 2015 sebanyak 275.736 TKI, terdiri dari 166.771 TKI perempuan (60%) dan 108.965 TKI laki-laki (40%). Sedangkan dari sisi tingkat pendidikan, TKI lulusan SD dan SMP tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari angka penempatan TKI tahun 2015 sebanyak 275.736 orang. Dari jumlah itu TKI yang lulusan SD sebanyak 90.393 orang (33%), lulusan SMP 108.724 orang (39%), lulusan SMU 70.309 orang (25%), lulusan Diploma 1.594 orang (1%), lulusan Sarjana 4.685 orang (2%), dan lulusan pascasarjana 31 orang (0%).

Sepanjang tahun 2015 dari jumlah penempatan TKI sebanyak 275.736 orang, dari 25 negara tertinggi adalah Malaysia 97.635 orang, Taiwan 75.303 orang, Saudi Arabia 23.000, Hongkong 15.322 orang, Singapore 20.895 orang, Uni Emirat Arab (UEA) 7.619 orang, Qatar 2.460 orang, Korea Selatan 5.501 orang, United States 1.029 orang, Oman 6.766 orang, Brunei Darussalam 9.993 orang, Bahrain 2.570 orang, Jepang 468 orang, Itali 1.516 orang, Kuwait 210 orang, Cina 108 orang, Spanyol 268 orang, Turki 1.108 orang, Afrika Selatan 113 orang, Mauritius 144 orang, Thailand 90 orang, Netherlands 52 orang, Fiji Islands 246 orang, Australia 77 orang, dan Jerman 194 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 3.049 TKI tersebar di berbagai negara penempatan lainnya.

Penempatan TKI ke luar negeri digolongkan menjadi dua sektor yakni sektor formal yang terdiri dari jenis industri seperti konstruksi, perminyakan, pertambangan, transportasi, jasa, perhotelan dan perawat. Sedangkan sektor informal meliputi pembantu rumah tangga. Penggolongan pekerjaan inilah yang menjadi tujuan para CTKI untuk mengembangkan diri di luar negeri serta berpenghasilan sesuai dengan kemampuan (*skill*) yang dimiliki, sehingga ikut menyumbang penghasilan bagi negara maka yang sering kita sebut pahlawan devisa negara.

Menurut data BNP2TKI dari tahun 2010 hingga 30 November 2015 penerimaan devisa dari remitansi mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2010 mencapai 6,74, tahun 2011 mencapai 6,73, tahun 2012 mencapai 6,99, tahun 2013 mencapai 7,40, pada tahun 2014 mencapai 8,43, dan tahun 2015 (s.d 30 November) mencapai 8,65 atau setara dengan Rp. 119.695.042.485.284,-. Remitansi terbesar berasal dari TKI yang bekerja di kawasan Asia seperti Malaysia, Taiwan, dan Hongkong. Kemudian disusul dari negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Uni Emirates Arab, Amerika, Eropa, serta Australia.

Remitansi merupakan pendapatan TKI yang dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga di Indonesia. Semakin banyak jumlah keluarga yang ditanggung maka TKI akan mengirimkan semakin banyak remitansi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapatan yang dikirimkan TKI dikirim melalui bank dengan biaya pengiriman tertentu. Selanjutnya setelah kiriman dari TKI yang diterima oleh keluarga di wilayah asal digunakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, seperti memperbaiki rumah, membayar hutang, membuka usaha dan lain sebagainya.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dapat dikelompokkan menjadi TKI prosedural dan TKI non prosedural, TKI prosedural adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara resmi yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang kuat, dilindungi secara hukum di negara penempatan sehingga relatif tidak mendapatkan permasalahan selama bekerja di luar negeri. TKI prosedural selanjutnya akan diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja sesuai dengan *skill* atau keahlian yang dikuasai. Sedangkan TKI non prosedural atau biasa disebut "*domestic worker*" atau penata laksana rumah tangga adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada pengguna perseorangan yang tidak berbadan hukum sehingga hubungan kerjanya subjektif dan relatif rentan menghadapi permasalahan. TKI non prosedural ini biasanya mereka yang menggunakan calo atau tekong yang memberikan iming-iming upah besar tanpa harus mengurus

persyaratan layaknya TKI prosedural tetapi pada kenyataannya merekalah yang dirugikan.

Meskipun data mengungkapkan bahwa jumlah TKI pada tahun 2016 ini mengalami penurunan drastis dan para calon TKI sudah mencoba menggunakan jalur prosedural, tetapi jumlah tersebut tidak mengartikan bahwa permasalahan terkait TKI begitu saja hilang. Pada tahun 2015 data pengaduan yang diterima BNP2TKI sebanyak 4.829 pengaduan, baik yang diterima secara langsung, melalui surat, *email*, SMS maupun telepon. Pengaduan ini terkait dengan permasalahan yang dialami TKI seperti gaji yang tidak dibayar, mengalami tindak kekerasan dari majikan, TKI tidak berdokumen, TKI yang sakit bahkan meninggal hingga TKI yang terpaksa dipulangkan (deportasi), pada tahun 2015 saja sebanyak 5.684 TKI yang dipulangkan melalui Nunukan, dibuktikan dengan adanya pemberitaan di surat kabar *online* di bawah ini:



**Gambar 1 Berita TKI**

Liputan6.com, Tangerang - Sebanyak 450 Warga Negara Indonesia (WNI) *overstayer* dan buruh migran yang tidak memiliki dokumen lengkap, dipulangkan dari Jeddah, Arab Saudi oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Rabu (11/11/2015).

Pemulangan dibagi dalam dua kloter melalui *Common-Use Lounge* TKI Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yakni pukul 12.00 WIB untuk kloter 1 sebanyak 320 orang, menggunakan pesawat AirAsia Extra XT 2994 ETA, dan

pukul 15.40 WIB untuk kloter 2 sebanyak 130 orang, dengan pesawat Emirates EK 356 ETA.

"Dari 450 orang, sebanyak 61 diantaranya adalah laki-laki, 216 perempuan, 77 anak-anak dan bayi," kata Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, ditemui di bandara, Rabu (11/11/2015).

Menurut Iqbal para buruh migran yang dipulangkan ini kebanyakan bermasalah karena masuk ke Arab Saudi menggunakan visa umroh, lalu bekerja dan tinggal di sana. Akibatnya mereka tidak mendapat hak-hak dan perlindungan hukum di sana.



**Gambar 2 Berita TKI**

BeritaSatu.com, Nunukan - Pemerintah Malaysia memulangkan lagi 122 warga negara Indonesia (WNI) bermasalah yang bekerja di Negeri Sabah melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara karena melanggar aturan keimigrasian.

Kepala Pos Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan Nasution di Nunukan, Jumat (1/4) malam mengatakan, pemulangan WNI ilegal yang bekerja di Negeri Sabah kali ini merupakan kedua kalinya dalam pekan ini.

Pada Kamis (31/3), jumlah WNI bermasalah yang dipulangkan pemerintah Malaysia dari Negeri Sabah sebanyak 213 orang yang terdiri 184 laki-laki, 28 perempuan dan seorang anak laki-laki yang berasal dari Pusat Tahanan Sementara (PTS) Menggatal, Sandakan.

Pemulangan kedua pekan ini berjumlah 122 orang yang terdiri 114 laki-laki dan delapan perempuan berasal PTS Air Panas Tawau dimana telah menjalani hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya sebagai pendatang asing di negara itu.

Nasution menyatakan WNI bermasalah kali ini semuanya kasus keimigrasian berdasarkan berita acara serah terima nomor 136/Kons/IV/2016 dari Konsulat RI Tawau kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan.

WNI yang dipulangkan itu tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka menggunakan kapal angkutan resmi KM Purnama Ekspres sekitar pukul 19.00 waktu setempat dan dijemput petugas satpol PP, kepolisian, TNI dan imigrasi setempat.

Selanjutnya diarahkan untuk pemeriksaan barang bawaan pada *x-ray* bea cukai kemudian didata dengan diberikan kartu identitas sebelum diangkut ke tempat penampungan Kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kabupaten Nunukan untuk diberikan pembekalan wawasan kebangsaan.

Metrotvnews.com, Brebes: Formigran Indonesia mendesak pemerintah serius menangani kasus hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selama ini penanganan kasus dinilai masih belum jelas, terutama yang modusnya penipuan.

“Misalnya terkait kasus terdamparnya para TKI di Pulau Jeju, Korea Selatan. Ada 26 TKI yang tertipu sehingga mereka dideportasi ke Indonesia beberapa pekan lalu. Pelakunya sudah ditangkap Mabes Polri,” kata aktivis Formigran Indonesia, Jamalludin Suryahadikusuma, di Hotel Dian, Brebes, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2016).

Jamal berharap, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Mabes Polri tidak hanya menangani kasus perdagangan manusia pada 26 TKI yang terkena tipu agen tenaga kerja gadungan.

Menurutnya, kedua lembaga pemerintah ini juga harus mengusut korban calon TKI yang belum diberangkatkan. Karena, selain jumlah yang disinyalir cukup banyak, mereka juga sudah membayar antara Rp40 juta hingga Rp70 juta kepada pelaku.

Inilah yang mendasari Formingran menilai penindakan hukum pada para calon TKI masih sangat lemah. Kedua lembaga tersebut lemah dalam mengusut penipuan para TKI yang tidak diberangkatkan. Padahal kata Jamal, dengan penindakan tersebut, diharapkan ada efek jera pada oknum PJTKI atau agen tenaga kerja.

“Kalau tidak ada penegakan hukum, tidak ada efek jera. Saya harap pemerintah meningkatkan sosialisasi dan terjun langsung ke pelosok-pelosok desa, sebagai wujud tindakan preventif pencegahan,” pinta Jamal.

Sejak moratorium Timur Tengah diberlakukan, jumlah penipuan TKI di sektor formal meningkat tajam. Untuk itu, Jamal meminta, Kepala BNP2TKI dan Kemenakertrans mengevaluasi program kerjanya. Baik penempatan TKI yang dilakukan pihak swasta maupun oleh pemerintah.

Sementara itu, Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiyantoro menjelaskan, penempatan TKI ke Korea Selatan hanya dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, BNP2TKI melakukan upaya sosialisasi supaya masyarakat menyadari adanya penipuan dari oknum PJTKI maupun agen.

“Antusiasme masyarakat sangat besar, mereka terlena karena diiming-imingi punya kuota,” ujar Agusdin.

Pemberitaan tersebut di atas merupakan beberapa contoh permasalahan yang dialami TKI ketika bekerja di luar negeri, permasalahan tersebut tidak saja hanya dialami oleh TKI non prosedural melainkan TKI prosedural pun bisa saja mengalaminya.

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berpengaruh terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah melalui lembaga yang memfasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi pekerja Internasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Untuk penyederhanaan prosedur dan mekanisme serta peningkatan pelayanan penempatan TKI telah dibentuk Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) di daerah provinsi pengirim TKI. BP2TKI tersebut berfungsi sebagai pelayanan satu atap, untuk mempermudah, mempermudah, mempercepat dan mengamankan proses penempatan TKI.

Suparno (27 Maret 2008 : 1-13)

Kenyataan yang ada di lapangan membuktikan bahwa para CTKI yang ingin bekerja ke luar negeri menganggap bahwa mereka merasa dipersulit sejak proses mengurus dokumen, hingga menjalani pelatihan dengan durasi waktu yang lama dan verifikasi dokumen persyaratan mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), sehingga terjadi penyimpangan dengan menggunakan jalan pintas atau cara instan untuk dapat berangkat bekerja ke luar negeri. Hal inilah yang memicu terjadinya permasalahan TKI.

Kurangnya keterlibatan BNP2TKI pada tahap perekrutan hingga ketika TKI yang sudah bekerja di negara tujuan menyebabkan terbukanya kerentanan eksploitasi tenaga kerja Indonesia sejak dini. Banyak juga para TKI yang merasa kurangnya peran BNP2TKI ketika ada TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri, selama ini ketika ada permasalahan yang menimpa TKI upaya penyelesaian yang dilakukan belum maksimal dan terkesan tidak tuntas. Kemudian ditambah pula pemberitaan di media cetak maupun elektronik yang terkadang menyudutkan BNP2TKI dan pada akhirnya membuat citra lembaga atau instansi BNP2TKI semakin memburuk.

Kurangnya informasi yang diterima CTKI/TKI karena pemerintah yang bertugas dalam pelayanan dan penempatan TKI belum optimal dalam memberikan informasi kepada mereka. Berbagai keluhan yang disebabkan oleh kurangnya akses dan fasilitas pelayanan informasi sebaiknya dapat dikurangi, apabila pemerintah semakin intensif dalam menyampaikan informasi hingga menjangkau tiap CTKI/TKI. Oleh karena itu, aspek pelayanan informasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan pemahaman CTKI/TKI terutama mengenai informasi hak dan kewajibannya. Primawati (vol.1, no.2, 2011 :1-18)

Peranan *public relations* atau Humas yaitu menjalin hubungan dengan publiknya, baik dengan publik internal perusahaan atau organisasi maupun dengan publik eksternal. *Public relations* memerlukan tempat menggambarkan isi peran dan fungsinya untuk memulihkan citra positif perusahaan, menjalin hubungan yang harmonis dengan publiknya dan menyelesaikan krisis yang terjadi. Di dalam suatu perusahaan, baik ia bergerak dalam bidang barang maupun jasa tentu pasti memiliki kerikil-kerikil kecil yang menghambat, apalagi ketika perusahaan

tersebut telah menjadi salah satu perusahaan ternama. Datuela (vol 2, no.1 2013 : 1-15)

Humas BNP2TKI dalam hal ini berusaha untuk memulihkan citra lembaga atau instansi dengan melakukan strategi-strategi kehumasan untuk bisa menyebarkan informasi secara lengkap kepada masyarakat dan bertujuan untuk menggiring opini publik kearah positif. Citra yang baik dari suatu perusahaan atau organisasi merupakan aset, karena citra memiliki dampak terhadap persepsi publik, dampak terhadap efektivitas komunikasi dan operasional organisasi atau perusahaan dalam berbagai segi.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam memulihkan citra karena permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hampir tidak ada habisnya seperti tidak pernah tidur dan hal tersebut dapat berakibat turunnya citra BNP2TKI dimata publik, oleh karena itu memulihkan citra disini diartikan BNP2TKI berusaha memperbaiki kembali citra yang sempat menurun dimata publik seputar permasalahan TKI dan meyakini bahwa BNP2TKI melalui Humas selalu berupaya mengarahkan segala cara untuk memperbaikinya karena menyangkut harkat martabat manusia.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Strategi Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam Memulihkan Citra?”**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam memulihkan citra.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu komunikasi serta dapat menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan ilmu komunikasi khususnya bidang kehumasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa/I komunikasi.

##### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam memulihkan citra terkait dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

#### **I.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai Teori Model Simetris Dua Arah, Definisi Konseptual Komunikasi, Tujuan Komunikasi, Humas, Humas Pemerintah, Fungsi Humas Pemerintah, Strategi Humas dan Memulihkan Citra yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kerangka berpikir.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Penentuan *Key Informan dan Informan*, Teknik-teknik

Pengumpulan Data, Waktu dan Tempat Penelitian serta Fokus Penelitian.

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan analisis untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap masalah penelitian dan merupakan gambaran kemampuan penulis dalam memecahkan masalah.

#### BAB V PENUTUP

Menyatakan pemahaman penelitian tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### LAMPIRAN

